BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada individu yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan kembali selama dua belas bulan atau satu tahun setelah pembayaran dilakukan. Jumlah uang yang diterima dari sektor pajak oleh negara dan daerah berkorelasi positif dengan jumlah penduduk. Karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai dampak paling besar terhadap pendapatan daerah, maka perlu dilakukan upaya memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan melalui berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor kemungkinan besar tidak akan meningkatkan pendapatan negara jika tidak didukung oleh kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Ketika masyarakat sadar akan pajak, pembayaran akan dilakukan secara sukarela dan tidak dipaksakan (Juliantari et al., 2021).

Pajak memainkan peran penting dalam membangun dan memfasilitasi wilayahnya, mulai dari tingkat provinsi hingga daerah. Pembangunan daerah tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya kontribusi dari wajib pajak. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua bagian: pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah, berdasarkan tingkat lembaga pemungut pajak. Hampir semua wilayah di Indonesia menggunakan pajak daerah untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, pemerintah

daerah harus berupaya meningkatkan sumber pendapatan potensialnya (Sufmawati et al., 2022).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang berkaitan dengan urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat jelas bahwa saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Hal ini disebabkan oleh kemudahan sistem kredit untuk mendapatkan mobil yang mereka inginkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan roda dua setiap tahunnya, maka pajak juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan pajak memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak maka akan sebanding dengan hasil penerimaan pajak yang akan juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak untuk membayar masih rendah maka akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak (Isnaini & Karim, 2021).

Pajak daerah merupakan pengalihan atas kepemilikan masyarakat berupa kekayaan kepada sumber keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan penanaman modal (investasi) yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang dirancang dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus dibayarkan di awal dan diselesaikan setiap 12 bulan atau setahun sekali. Pajak ini dikenakan kepada individu atau entitas hukum yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Proses pengumpulan pajak kendaraan bermotor dipantau oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui implementasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang umumnya disingkat sebagai SAMSAT (Juliantari et al., 2021).

SAMSAT merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, biaya perubahan nama kendaraan, serta kontribusi wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Semua proses ini terintegrasi dan terkoordinasi di satu lokasi kantor yang bersama-sama (Ketut et al., 2023). Peran pajak kendaraan bermotor sebagai komponen penting dalam pendapatan daerah sangat krusial, memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Pertumbuhan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi semakin signifikan seiring dengan peningkatan jumlah pemilik kendaraan yang terdaftar. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat dari data selama lima tahun terakhir di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Membayar
Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kudus**

Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Membayar Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor
2018	358.753	16.702
2019	493.736	4.621
2020	514.312	17.217
2021	537.262	19.466
2022	579.435	21.880
Total	579.435	79.886

Sumber: UPPD Kabupaten Kudus 2023

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada tabel 1.1 mencakup jumlah pemilik kendaraan bermotor dari berbagai jenis seperti motor, mobil, bus, dan truk. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang signifikan. Pembangunan jalan tidak dapat mengejar laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin cepat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas di jalan raya, yang mengakibatkan kemacetan, memperlambat arus lalu lintas, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk kepentingan masyarakat, dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan bersama ini.

Jumlah wajib pajak yang belum membayar kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya berjumlah 16.702; tahun 2019 wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya berjumlah 4.621; tahun 2020 wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya berjumlah 17.217; tahun 2021 wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya berjumlah 19.466; tahun 2022 wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya berjumlah 21.880. Peningkatan wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor bertambah setiap tahun, tidak dapat dipastikan bahwa mereka akan patuh dalam membayar pajaknya.

Fenomena yang terjadi yaitu terdapat wajib pajak yang masih belum patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. TribunMuria. com (2022) memaparkan bahwa Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus mendata, 41.304 kendaraan bermotor tidak tertib pajak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada 2019-2021. Sementara jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus diperkirakan mencapai 550 ribu unit. Dari jumlah tersebut, UPPD Samsat Kudus mencatat tunggakan dari wajib pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 14,645 miliar, belum termasuk tunggakan pembayaran wajib pajak sepanjang 2022. Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPPD Samsat Kudus, Sukatmo mengatakan, data tersebut dihimpun dalam kurun waktu tiga tahun

hingga akhir Desember 2021. Menurutnya, berbagai faktor menjadi penyebab tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya, faktor ekonomi masyarakat, pandemi Covid-19, kendaraan dalam keadaan rusak berat dan tidak pernah dilaporkan, kendaraan hilang, hingga kendaraan berubah fungsi, seperti sepeda motor menjadi angkutan sampah, kendaraan yang dijaminkan, kendaraan jadi barang bukti kasus dan beberapa faktor lainnya. Yang kami kejar adalah kendaraan yang masih dimiliki pribadi.

Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPPD Samsat Kudus, Sukatmo menuturkan, upaya untuk menekan angka kendaraan yang tidak tertib pajak melalui program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Jawa Tengah tertuang dalam Pergub Nomor 23 Tahun 2022. Meliputi, pembebasan pokok PKB tahun ke-5 diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun, bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) mulai 7 September - 22 November 2022, dan pembebasan bea balik nama mobil dan motor kepemilikan kedua dan seterusnya, dalam dan luar provinsi mulai 7 September - 22 Desember 2022. Sukatmo menyebut, sudah ada 8.411 kendaraan bermotor yang memanfaatkan program tersebut dengan nilai pembayaran pajak Rp 4,285 miliar. Pihaknya memperkirakan, program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor bisa meringankan beban wajib pajak 40-50 persen lebih hemat dari nilai wajib pajak yang seharusnya dibayarkan.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh penerimaan pajak.

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membantu mendanai pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Dapat didefinisikan juga bahwa pajak adalah partisipasi wajib pajak kepada negara tergantung oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Kontribusi ini digunakan untuk kepentingan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Salah satu contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang harus dibayar oleh semua pemilik kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari untuk mendukung kebutuhan pemiliknya dan dioperasikan di jalan umum (Rasyid, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kemampuan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan meningkat, ini akan berdampak positif pada kenaikan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula keuntungan bagi negara (Fadhila, 2020).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah permasalahan yang penting bagi semua negara di seluruh dunia, termasuk negara maju maupun berkembang. Jika wajib pajak tidak mematuhi, hal ini dapat memicu dorongan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak (Isnaini & Karim, 2021). Kepatuhan pajak adalah fenomena yang sangat kompleks jika dilihat dari berbagai

sudut pandang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi kecenderungan terhadap instansi publik (seperti Direktorat Jenderal Pajak), persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan yang berlaku, penilaian mereka terhadap keadilan, serta ketegasan hukum dan sanksi yang diberlakukan.

Faktor pertama yaitu kesadaran wajib pajak. niat baik seseorang untuk mematuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas (Hidayat & Maulana, 2022). Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek perpajakan tanpa tekanan dari pihak lain (Rianty & Syahputepa, 2020). Kesadaran wajib pajak masih rendah, terlihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang besar di Kantor SAMSAT Kudus. Kesadaran wajib pajak tercermin dari komitmen dan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kesadaran ini sangat penting untuk meningkatkan kesediaan membayar pajak. Kesadaran atas tanggung jawab ini merupakan hal mendasar dalam pembangunan, diharapkan agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Kesadaran perpajakan berasal dari dalam diri wajib pajak. Jika mereka mulai memahami dan menghargai pentingnya membayar pajak, ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini & Karim (2021), Haninun & Lourent (2022), dan Habib (2023) pada kota Tidore Kepulauan menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran

wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan Hormati et al., (2021) dan Habib (2023) pada kota Ternate mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bahwa wajib pajak masih rendah akan kewajiban membayar pajak.

Faktor kedua yaitu kualitas pelayanan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan layanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas layanan merujuk pada proses bantuan kepada wajib pajak dengan berbagai metode yang memerlukan kepekaan dan interaksi antarpribadi agar menciptakan kepuasan dan efektivitas. Interaksi yang berkualitas, lingkungan yang kondusif, dan hasil layanan yang memuaskan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Fridayani, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Desiva & Kholis (2022), Pravasanti & Pratiwi (2020), Rusliaman & Sofianty (2021), dan Ayu et al., (2023) mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan Iglesias (2021) dan Pandya & Hidayat (2020) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor bahwa meskipun dengan adanya kualitas pelayanan yang baik tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu sosialisasi perpajakan. Dengan mengadakan sosialisasi perpajakan melalui berbagai metode yang lebih dikenal oleh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi dan penyuluhan perpajakan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.. Sosialisasi perpajakan dilakukan guna memberikan informasi yang tepat dan benar kepada wajib pajak agar menyadarkan mereka akan pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Juliantari, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih & Amelia (2022), Aprilianti (2021), dan Desiva & Kholis (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka semakin banyak dilakukan kegiatan sosialisasi akan memperluas pengetahuan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Haninun & Lourent (2022) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa besar ataupun kecilnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan bukanlah suatu hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Faktor keempat yaitu implementasi pajak progresif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selain berfungsi sebagai sumber penerimaan, juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi pemerataan. Dimana fungsi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial, khususnya kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Artinya jika masyarakat yang berpenghasilan tinggi memiliki kendaraan lebih dari satu maka akan membayar pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu di Indonesia menerapkan tarif pajak progresif, agar rasa keadilan dan pertimbangan asas kemampuan lebih wajib pajak atau masyarakat atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya (Sulaeman & Nurul Wahidah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut et al., (2023) dan Wijaya (2020) menyatakan implementasi pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan manfaat bagi pemerintah daerah menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Ayu (2023) dan Mawar & Selani (2021) mengatakan bahwa implementasi pajak progresif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak melakukan penyeludupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak.

Berdasarkan pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk salah satu jenis pajak progresif, yang merupakan pajak tarif pemugutannya mengalami persentase kenaikan sesuai

dengan kenaikan objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tujuan penerapan pajak progresif yaitu pertama untuk menekan laju kenaikan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan yang di sediakan dan mampu mengurangi angka kemacetan, kedua meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketiga membatu dalam tertib administrasi agar nama yang tecantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpidah tangan, sehingga sesuai dengan rincian yang terdaftar di kantor Samsat (Sulaeman & Nurul Wahidah, 2021).

Berdasarkan penelitian di lapangan banyak permasalahan yang terjadi pada saat masyarakat membayar pajak kendaraan, dimana masyarakat harus membayar dengan nominal yang tinggi walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi, hal ini sering terjadi karena pada proses jual beli kendaraan masyarakat tidak langsung melakukan bea balik nama kendaraan (Sulaeman & Nurul Wahidah, 2021).

Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan kemacetan, sebab untuk membatasi pertumbuhannya jelas sangat sulit dan tidak mudah, karena akan berbenturan dengan kebijakan yang lain. Penyebab lain dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor adalah kemudahan dalam pembelian kendaraan secara kredit. Oleh karena itu perlu adanya hubungan kerja sama antara pemerintah dengan pihak dealer terkait dengan pembelian kendaraan bermotor, agar tujuan penerapan pajak progresif kendaraan dapat terwujud (Sulaeman & Nurul Wahidah, 2021).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nugraha (2012) tentang Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota), hasil penelitian ini adalah penerapan pajak progresif kendaraan bermotor memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor dan dampak negatifnya yaitu adanya upaya masyarakat dalam menghindari pajak progresif (Sulaeman & Nurul Wahidah, 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Hormati et al. (2021). Namun studi ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama terletak pada penggunaan variabel independen yang lebih banyak. Sebelumnya, penelitian hanya memakai dua variabel independen, yakni kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan. Namun, dalam penelitian ini, ditambahkan dua variabel independen tambahan, yakni sosialisasi perpajakan dan implementasi pajak progresif. Penambahan variabel sosialisasi perpajakan berasal dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilianti (2021) dan variabel implementasi pajak progresif berasal dari peneliti sebelumnya yaitu Barokah et al. (2023). Penambahan variabel independen ini berdasarkan saran yang diberikan peneliti sebelumnya yaitu disarankan untuk menambah variabel-variabel independen lain. Objek dalam penelitian sebelumnya berada di Kantor Samsat Tomohon, sedangkan objek dalam penelitian ini berada di Kantor Samsat Kudus. Perbedaan yang kedua, objek dalam penelitian Hormati et

al. (2021) dilakukan di kantor Samsat Tomohon, sedangkan objek penelitian ini dilakukan di kantor Samsat Kudus.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN IMPLEMENTASI PAJAK PROGRESIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Implementasi Pajak Progresif.
2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus.
3. Lokasi penelitian ini di daerah Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus?
4. Apakah Implementasi Pajak Progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh Implementasi Pajak Progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau penelitian dengan objek yang sejenis.

2. Bagi Kantor SAMSAT Kudus

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.

3. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan, kesadaran, kualitas pelayanan dan persepsi yang baik terhadap perpajakan di Indonesia.

4. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Selain itu, dapat membandingkan antara yang di pelajari di perkuliahan dengan yang di temukan dalam praktek.